



Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023

Syabilal Ali^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: syabilalali@upnvi.ac.id, handar_subhandi@yahoo.com

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Korespondensi penulis: syabilalali@upnvi.ac.id*

Abstract: *The corruption case in Indonesia, specifically the BTS project scandal by the Ministry of Communication and Informatics, reflects serious challenges in public financial management. According to information from Transparency International, Indonesia still ranks as a country with a high level of corruption. The BTS project, aimed at improving internet access in remote areas, has been revealed to suffer from budget misuse and corrupt practices by high ranking officials. To address this issue, forensic audits and digital evidence have become crucial tools in uncovering crimes. However, challenges such as a lack of trained human resources, limited technological infrastructure, and inter-agency coordination hinder the effectiveness of law enforcement. Integrated efforts to enhance the capacity of law enforcement and technological infrastructure are needed to effectively combat corruption and create a clean and transparent government.*

Keywords: *Corruption, BTS project, Government.*

Abstrak: Kasus korupsi di Indonesia, khususnya skandal proyek BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan publik. Berangkat dari informasi yang diberikan oleh *Transparency International* yang menyebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Proyek BTS, yang bertujuan meningkatkan akses internet di daerah, terungkap mengalami penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi oleh pejabat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, audit forensik dan bukti digital menjadi alat penting dalam pengungkapan kejahatan. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas penegakan hukum. Upaya terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas penegak hukum dan infrastruktur teknologi diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif, menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kata kunci: Korupsi, Proyek BTS, Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Kasus korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Menurut laporan *Transparency International*, Indonesia masih terperangkap dalam lingkaran korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh *Transparency International* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara, dengan skor 38 dari 100, yang mencerminkan tingkat korupsi yang tinggi (Internationa, 2020). Korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan daya saing nasional di tingkat global. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah, yang berkomitmen untuk melakukan reformasi dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Salah satu kasus korupsi besar yang mencuat pada tahun 2023 adalah kasus korupsi yang melibatkan proyek pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Proyek ini dirancang untuk meningkatkan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas infrastruktur digital di Indonesia. Dengan anggaran mencapai Rp 8 triliun, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Namun, investigasi yang dilakukan oleh KPK mengungkap adanya penyalahgunaan anggaran, penggelembungan biaya, dan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di kementerian (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Kasus BTS Kominfo tidak hanya mencerminkan praktik korupsi yang sistemik, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan penggunaan teknik-teknik investigasi yang lebih modern dalam mengungkap kejahatan. Dalam konteks ini, audit forensik dan bukti digital muncul sebagai alat penting dalam proses pembuktian. Audit forensik merupakan pendekatan investigatif yang menggabungkan keahlian akuntansi, teknik investigasi, dan analisis data untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuktian dengan Alat Bukti Digital, hukum forensik dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan keuangan yang kompleks, termasuk praktik korupsi. Proses audit forensik melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengumpulan bukti, analisis laporan keuangan, hingga penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014). Dengan adanya audit forensik, penyidik dapat menggali informasi lebih dalam mengenai aliran dana dan aktivitas keuangan yang mencurigakan.

Dalam hukum Indonesia sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP telah memberikan kejelasan bahwa dalam proses penentuan seseorang telah bersalah atau melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada alat bukti dengan syarat keterpenuhan minimal 2 (dua) alat bukti dan dengan alat bukti tersebut terbangun keyakinan hakim (Bakhtiar, 2022). Penggunaan bukti digital semakin menjadi elemen penting dalam sistem peradilan saat ini. Bukti digital mencakup data yang disimpan dalam format elektronik, seperti transaksi keuangan, email, rekaman komunikasi, dan informasi yang tersimpan di perangkat digital lainnya. Penggunaan bukti digital dalam proses peradilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam konteks kasus korupsi BTS Kominfo, bukti digital dapat digunakan untuk membangun narasi mengenai pengalihan dana, keterlibatan individu dalam praktik korupsi, serta menyusun kronologi kejadian yang lebih jelas.

Meskipun audit forensik dan bukti digital menawarkan peluang besar untuk pengungkapan kejahatan, penerapan teknik ini dalam penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain sebagai berikut (Nurdin, 2022):

- a. Terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang forensik keuangan;
- b. Banyak penegak hukum, termasuk jaksa dan penyidik, yang belum sepenuhnya memahami teknik-teknik forensik modern dan analisis data yang diperlukan untuk mengungkap praktik korupsi secara efektif; dan
- c. Pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam bidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang mendukung analisis forensik menjadi hambatan signifikan dalam mengungkap kasus korupsi. Banyak lembaga penegak hukum yang belum memiliki akses terhadap perangkat dan *software* yang diperlukan untuk melakukan analisis data digital secara menyeluruh. Investasi dalam teknologi yang tepat sangat diperlukan agar audit forensik dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Sukma, 2023).

Ketiga, tantangan kerjasama antar lembaga penegak hukum juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengungkapan kasus. Seringkali, ada kurangnya koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi yang kompleks. Kerjasama yang lebih baik dan sinergi antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempermudah proses pengumpulan bukti (Budianto, 2021).

Lebih jauh lagi, validitas dan keabsahan bukti digital dalam proses peradilan menjadi perhatian utama. Penggunaan bukti digital dapat menimbulkan isu terkait manipulasi data, privasi, dan masalah hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan prosedur yang jelas dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti digital agar tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejelasan dalam regulasi dan pedoman penggunaan bukti digital akan membantu mengurangi potensi sengketa di pengadilan.

Dalam konteks hukum forensik, pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar dalam pembuktian ilmiah juga menjadi krusial. Hukum forensik mengharuskan semua bukti yang diajukan harus dapat dibuktikan, dapat diuji, dan memiliki keandalan yang tinggi. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang dihasilkan melalui audit forensik dan analisis bukti digital dapat diterima di pengadilan.

Kasus korupsi BTS Kominfo 2023 tidak hanya menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dan metodologi modern dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan hukum. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu ada upaya terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, memperkuat infrastruktur teknologi, dan mengembangkan kerjasama yang lebih baik antar lembaga.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penggunaan audit forensik dan bukti digital dapat berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Memahami dan menerapkan teknik ini dengan baik akan memberikan dampak positif bagi sistem hukum dan keadilan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Hanya dengan cara ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam sebuah penelitian yang menentukan kemana pembahasan akan dibawa adalah dengan cara penulis memilih teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menggunakan kajian teori antara lain sebagai berikut:

a) Teori Pembuktian Hukum

Teori pembuktian hukum merupakan dasar bagi semua proses litigasi yang melibatkan pengujian terhadap keabsahan dan validitas bukti. Dalam konteks hukum pidana, teori ini mengatur bagaimana bukti harus disusun, diajukan, dan dinilai oleh pengadilan untuk menentukan kebenaran suatu perkara. Menurut hukum acara pidana, beban pembuktian berada di tangan penuntut umum, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang sah dan relevan.

Dalam kasus korupsi BTS Kominfo, penerapan teori pembuktian ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperoleh melalui audit forensik dan bukti digital dapat dipertanggungjawabkan dan diterima di pengadilan. Bukti yang

tidak sah atau tidak valid dapat merugikan proses penegakan hukum dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.

b) Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya pada hukuman bagi pelanggar hukum. Dalam konteks kasus korupsi, pendekatan ini menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat praktik korupsi. Menurut Bazemore dan Umbreit, keadilan restoratif melibatkan partisipasi semua pihak yang terkena dampak, termasuk korban, pelanggar, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian sengketa (Bazemore & Umbreit, 2004).

Penggunaan audit forensik dan bukti digital dalam pengungkapan kasus korupsi dapat berkontribusi pada keadilan restoratif dengan membantu mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat. Dengan mengungkap penyimpangan anggaran dan mengembalikan kerugian keuangan, proses ini mendukung upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

c) Teori Hukum dan Teknologi

Teori hukum dan teknologi mengkaji hubungan antara perkembangan teknologi dan implementasi hukum. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Penggunaan bukti digital sebagai alat bukti sah dalam proses hukum menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkuat penegakan hukum (Sukma, 2023).

Dalam kasus korupsi BTS Kominfo, penerapan teknologi dalam audit forensik dan analisis bukti digital dapat meningkatkan efisiensi penyidikan dan akurasi pembuktian. Pemahaman yang mendalam tentang hukum terkait bukti digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

d) Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga publik untuk bertindak secara transparan dan akuntabel terhadap masyarakat. Dalam konteks korupsi, akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mengelola sumber daya negara dengan baik. Menurut Bovens, akuntabilitas publik mencakup tiga aspek utama:

akuntabilitas vertikal (kepada masyarakat), akuntabilitas horizontal (antar lembaga), dan akuntabilitas sosial (Bovens, 2007).

Dalam kasus korupsi BTS Kominfo, audit forensik dan bukti digital dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas publik dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan anggaran dan praktik korupsi. Proses ini juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan mengurangi tingkat korupsi di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi.

Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu (Efendi & Ibrahim, 2018). Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori - teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*) (Nurhayati et al., 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian Hukum

Dalam era digital, bukti digital telah menjadi salah satu komponen penting dalam pembuktian hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Bukti digital mencakup berbagai bentuk informasi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan secara elektronik, seperti email, pesan instan, rekaman transaksi keuangan, *file* komputer, metadata, serta data *log server*. Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, bukti digital

telah diterima di pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam membantu proses pembuktian kejahatan.

a. Definisi dan Jenis Bukti Digital

Bukti digital didefinisikan sebagai setiap informasi yang dihasilkan atau disimpan dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk keperluan penyelidikan dan proses hukum. Dalam konteks kejahatan finansial atau korupsi, bukti digital sering kali berupa:

- 1) Dokumen elektronik seperti laporan keuangan, kontrak, dan invoice.
- 2) Email dan komunikasi elektronik yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam transaksi ilegal.
- 3) Log server dan metadata yang menunjukkan jejak aktivitas pengguna atau perubahan data pada sistem komputer.

b. Peran Bukti Digital Dalam Pembuktian Hukum

Bukti digital berperan penting dalam membangun kronologi peristiwa, mengungkap jejak digital yang sering kali tidak bisa dihapus sepenuhnya, dan menyediakan bukti kuat yang dapat mendukung klaim atau dakwaan. Dalam proses pembuktian hukum, bukti digital dapat berfungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengonfirmasi Tindakan Pelaku
Misalnya, data log komunikasi atau transaksi dapat digunakan untuk menunjukkan kapan, di mana, dan bagaimana suatu tindakan dilakukan.
- 2) Menyediakan Rekaman Jejak Finansial
Bukti digital dapat menelusuri aliran dana melalui transaksi bank atau pembayaran elektronik, yang sering kali digunakan dalam kasus kejahatan finansial, termasuk korupsi.
- 3) Membantu Dalam Mengungkap Konspirasi
Data elektronik seperti percakapan email atau pesan teks sering kali digunakan untuk membuktikan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi atau penyelewengan.

Bukti digital juga diakui oleh hukum Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memungkinkan penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang memungkinkan penyampaian dan pengelolaan bukti digital secara elektronik.

c. Tantangan Dalam Penggunaan Bukti Digital

Meski bukti digital memiliki peran besar, terdapat beberapa tantangan dalam penggunaannya, termasuk:

1) Autentikasi dan Keabsahan

Bukti digital rentan terhadap manipulasi, sehingga diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan keaslian dan integritasnya. Ini memerlukan metode forensik yang canggih, seperti audit trail dan enkripsi.

2) Perlindungan Data Pribadi

Penggunaan bukti digital juga harus memperhatikan regulasi tentang perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan demikian, bukti digital berkontribusi besar dalam pembuktian kasus-kasus korupsi dengan menyediakan jejak elektronik yang detail dan memudahkan proses verifikasi fakta dalam investigasi dan pengadilan.

Audit Forensik Dapat Diterapkan Untuk Mengungkap Penyimpangan Keuangan Dalam Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023

Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023 merupakan salah satu skandal besar yang melibatkan pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk memperluas akses internet di wilayah terpencil. Dugaan korupsi dalam kasus ini melibatkan penyimpangan keuangan yang signifikan, mulai dari penggelembungan anggaran hingga manipulasi dokumen proyek. Dalam konteks ini, audit forensik berperan penting dalam mengungkap penyimpangan keuangan dan memberikan bukti yang kuat bagi proses penegakan hukum.

a. Definisi dan Tujuan Audit Forensik

Audit forensik adalah audit yang dilakukan dengan tujuan investigatif untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap aktivitas keuangan yang mencurigakan atau tidak wajar, terutama dalam konteks kecurangan atau korupsi. Fokus utama audit forensik adalah: (Arens et al., 2019)

1) Mengidentifikasi pola keuangan yang tidak wajar.

2) Menelusuri aliran dana untuk memastikan apakah anggaran proyek telah digunakan sesuai peruntukan.

- 3) Menganalisis dokumen keuangan dan catatan transaksi yang berpotensi dimanipulasi atau digunakan untuk menutupi tindakan korupsi.

b. Penerapan Audit Forensik dalam Kasus Korupsi BTS Kominfo

Dalam kasus BTS Kominfo 2023, audit forensik diterapkan melalui beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisis Dokumen Proyek dan Kontrak

Auditor forensik akan meneliti kontrak pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa biaya yang tercantum sesuai dengan nilai pasar dan tidak terjadi penggelembungan anggaran. Dalam kasus BTS, kemungkinan besar ada manipulasi anggaran atau kontrak yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan.

- 2) Penelusuran Aliran Dana

Audit forensik bertujuan menelusuri aliran dana dari pemerintah atau pemberi proyek kepada kontraktor dan pihak ketiga lainnya. Transaksi yang tidak wajar, seperti pembayaran yang terlalu besar atau transaksi antar akun yang mencurigakan, akan diidentifikasi. Ini dapat membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan dana proyek.

- 3) Pemeriksaan Bukti Digital

Dalam era digital, sebagian besar catatan keuangan dikelola secara elektronik. Auditor akan memeriksa sistem manajemen keuangan berbasis perangkat lunak, email, dan sistem akuntansi untuk menemukan indikasi manipulasi data atau penyalahgunaan dana. Penggunaan bukti digital dalam audit forensik memungkinkan untuk mengidentifikasi modus operandi yang dilakukan, seperti perubahan dokumen keuangan secara ilegal.

- 4) Pelacakan Transaksi Antar Perusahaan

Auditor juga akan meneliti apakah ada transaksi antar perusahaan yang saling terafiliasi, yang mungkin digunakan untuk menutupi penyimpangan. Pada kasus korupsi besar, perusahaan fiktif atau perusahaan yang terkait dengan oknum sering digunakan untuk menutupi aliran dana hasil korupsi.

c. Hasil dari Audit Forensik

Dalam kasus BTS Kominfo, audit forensik memiliki beberapa hasil potensial: (KPMG Forensic, 2020)

- 1) Pengungkapan Penggelembungan Biaya, auditor dapat menemukan bahwa biaya pengadaan alat dan material untuk pembangunan BTS telah digelembungkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
- 2) Identifikasi Pihak Terlibat, dengan menelusuri aliran dana, auditor dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan anggaran, baik di tingkat eksekutif proyek maupun penyedia barang dan jasa.
- 3) Bukti Untuk Proses Hukum, hasil audit forensik dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk mendukung dakwaan terhadap para pelaku korupsi.
- 4) Audit forensik memiliki peran yang sangat krusial dalam mengungkap skema kompleks yang sering kali dilakukan dalam kasus korupsi skala besar seperti BTS Kominfo. Penerapannya memastikan bahwa semua aspek keuangan proyek diperiksa secara teliti dan semua penyimpangan dapat diungkap.

5. KESIMPULAN

Dalam era digital, bukti digital telah menjadi elemen penting dalam pembuktian hukum, khususnya dalam kasus kejahatan keuangan dan korupsi. Bukti digital, seperti dokumen elektronik, log server, dan komunikasi digital, dapat memberikan jejak elektronik yang jelas, membantu mengungkap fakta dan kronologi peristiwa. Di Indonesia, bukti digital diakui oleh hukum melalui UU ITE dan Peraturan Mahkamah Agung, meskipun terdapat tantangan terkait autentikasi dan perlindungan data pribadi.

Audit forensik, sebagai alat investigatif, berperan krusial dalam mendeteksi penyimpangan keuangan, seperti dalam kasus korupsi BTS Kominfo 2023. Audit ini memungkinkan identifikasi penggelembungan biaya, pelacakan aliran dana yang tidak wajar, dan analisis bukti digital yang mendalam. Hasil audit forensik dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dan menjadi bukti kuat di pengadilan. Secara keseluruhan, kombinasi bukti digital dan audit forensik memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap kejahatan keuangan, mendukung proses penegakan hukum dengan bukti yang terverifikasi dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2019). *Auditing and assurance services*. Pearson.
- Bakhtiar, H. S. (2022). *Pentingnya bukti forensik pada pembuktian tindak pidana*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(2), 36–43.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2004). 19 Balanced and Restorative Justice. In *Juvenile Justice Sourcebook: Past, Present, and Future* (p. 467).
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Budianto, J. (2021). Sinergi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 45–58.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Internationa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Investigasi Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023*.
- KPMG Forensic. (2020). *Forensic Audit Report: Understanding Financial Irregularities*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pembuktian dengan Alat Bukti Digital*.
- Mahkamah Agung. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik*.
- Marzuki. (2024). *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Nurdin, A. (2022). Pentingnya pelatihan forensik keuangan untuk penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2), 123–135.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Redi, A. (2020). *Omnibus Law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukma, R. (2023a). Hukum dan teknologi: Menyongsong era digital dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 10(1), 45–67.
- Sukma, R. (2023b). Tantangan teknologi dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Teknologi Hukum*, 10(1), 89–102.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. Transparency International: The Global Coalition against Corruption.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. (2008). *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. (2022). *Tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Zainal Arifin Mochtar, & Eddy O. S. Hiariej. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Depok: Rajawali Press.